



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;  
2. Plt.Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama;  
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;  
4. Sekretaris KPU Provinsi;  
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan  
6. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua KPU tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah dan mengurangi resiko penyebaran COVID – 19 khususnya di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan masyarakat pada umumnya;
2. Memberikan acuan dalam penerapan Sistem Kerja *Work from Home* (WFH) di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
3. Menjadi pedoman dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

#### C. Ruang Lingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
8. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### E. Isi Edaran

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home/WFH*) bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pejabat/Pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah dimana masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berlokasi agar melakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor agar dilakukan dengan selektif dan akuntabel dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
3. Dalam rangka pelaksanaan *Work From Home* sebagaimana pada huruf E angka 1 dan 2 tersebut di atas agar Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

4. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang mengatur ketentuan tentang mekanisme menjalankan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*), masih tetap berlaku, kecuali yang terkait masa pelaksanaan *Work From Home* sesuai ketentuan huruf E angka 1 surat edaran ini.
5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada *smartphone* yang dimiliki, dapat diunduh melalui *playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS, serta mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.

6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 APRIL 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Anief Budiman

